

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah pendirian badan usaha ini muncul sejak tahun 1970-an, setelah selesainya dua bendungan besar di wilayah sungai kali brantas. Setelah melakukan studi banding ke beberapa lembaga pengelolaan air dan prasarana pengairan di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang dan Prancis pada awal tahun 1980-an, diputuskan untuk mengkaji viabilitas dari pendirian suatu lembaga pengelolaan serupa di Indonesia.

Dari berbagai usulan yang masuk dan berdasarkan pertimbangan yang strategis, maka pekerjaan mengkaji kemungkinan pendirian badan usaha ini diserahkan kepada konsultan PT. Indoconsult yang dipimpin almarhum Prof. DR. Sumitro Djohadikusumo. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan para pakar sumber daya air pada saat itu, baik mengenai lingkup tugas dan sasaran yang hendak dicapai, PT. Indoconsult menyepakati untuk menyerahkan laporan hasil studi kepada menteri pekerjaan umum yang saat itu dijabat oleh DR.Ir.Suyono Sosrodarsono.

Pada tanggal 4 November 1986, dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri PU disepakati pembentukan suatu lembaga yang

menangani wilayah sungai kali brantas dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas. Setelah melalui pembahasan antar departemen yang cukup rinci dan panjang, akhirnya disepakati untuk menerbitkan peraturan pemerintah sebagai akta pendirian Perum Jasa Tirta di Wilayah Sungai Brantas. Pada tanggal 12 Februari 1990, terbitlah PP Nomor 5 tahun 1990 tentang Perum Jasa Tirta, sebagai sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang berkedudukan di kota malang.

Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP Nomor 5 tahun 1990 pada tanggal 1 Nopember 1991, lahir peraturan menteri PU Nomor : 56/PRT/1991 tentang kebijaksanaan umum pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. Peraturan ini merupakan arahan operasional bagi Perum Jasa Tirta I. Pada pasal 6 dari peraturan tersebut, Perum Jasa Tirta diberi tugas pokok yang meliputi:

1. Eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan.
2. Perusahaan air dan Sumber-sumber air.
3. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Yakni : perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air serta sumber-sumber air.
4. Rehabilitasi prasarana pengairan (sesuai kewenangan perusahaan).

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 93 Tahun 1999 (13 Oktober 1999) yang mengatur keberadaan Perum Jasa Tirta. Sesuai pasal 2 ayat (2) dari PP tersebut, ditetapkan Perum Jasa Tirta sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 5 Tahun 1990 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. Dalam melaksanakan tugas pemerintah berkaitan dengan pengelolaan air dan

prasarana pengairan di WS Kali Brantas dan WS Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta I berpedoman pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang menjaga keseimbangan antara misi pemerintah dan misi perusahaan. Pelaksanaan tugas pokok telah diupayakan peningkatannya secara lebih memadai sesuai RKAP dan rencana jangka Panjang.

Selain tugas pokok Perum Jasa Tirta I terdapat pula tugas khusus yang di amanatkan pemerintah melalui keluarnya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER.05/MBU//2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sehingga dalam hal ini Perum Jasa Tirta I selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil agar menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), diharapkan dapat memberi efek berupa meningkatnya taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara perusahaan dengan usaha kecil. Mitra Binaan Perum Jasa Tirta I yang dimaksud adalah warga masyarakat ekonomi lemah dengan berbagai macam usaha meliputi : sektor industri (industri kerajinan, rumah tangga, industri pakaian dan industri makanan), sektor perdagangan (kebutuhan bahan pokok, perancangan, jual makanan dan minuman),

sektor pertanian, sektor peternakan dan sektor jasa dan lain-lain yang bersekala kecil dengan pengolahan usaha yang masih sederhana. Sedangkan penerima bantuan bina lingkungan adalah masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja Perum Jasa Tirta I yang betul-betul membutuhkan dan skala prioritas yang kepada masyarakat.

b. Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

Menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pengelolaan sumber daya air terbaik di Asia Pasifik pada tahun 2025.

Misi :

Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan Sumberdaya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta sanitasi sesuai penugasan pemerintah yang memuaskan semua pemangku kepentingan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel.

c. Lokasi Kantor Perusahaan

Perum Jasa Tirta I memiliki beberapa lokasi Kantor Antara Lain :

❖ **KANTOR PUSAT**

Alamat : Jl. Surabaya 2A Malang PO.Box.39

Telp/ fax : (0341) 551971 / (0341) 551976

E-mail : mlg@jasatirta1.co.id

Homepage : <http://www.jasatirta1.co.id>

❖ Kantor Divisi Jasa ASA I

Alamat : Jl. Bendungan Lahor No.10, Ds. Karangkates,
Kec. Sumberpucung Kab. Malang, 65165

Telp/fax : (0341) 384696 / (0341) 384694

E-mail : dja1@jasatirta1.co.id

❖ Kantor Divisi Jasa ASA II

Alamat : Jl. Sekartaji No.5 Kediri 64101

Telp/ fax : (0354) 682201, 681883 / (0354) 68970

E-mail : dja2@jasatirta1.co.id

❖ Kantor Divisi Jasa ASA III

Alamat : Jl. Karah No.6 Gunungsari Surabaya, 60232

Telp/fax : (031) 8280138 / (031) 8286291

E-mail : dja3@jasatirta1.co.id

❖ Kantor Divisi Jasa ASA IV

Alamat : Ds. Pengkol, Kec.Nguter, Kab. Sukoharjo, 57574

Telp/fax : (0271) 6594057 / (0271) 6594057

E-mail : dja4@jasatirta1.co.id

❖ Kantor Divisi Jasa ASA V

Alamat : Jl. Madiun-Maospati Jiwon KM 5 Madiun, 63161

Telp/ fax : (0351) 865206 / (0351) 472174

E-mail : dja5@jasatirta1.co.id

❖ KANTOR WS BENGAWAN SOLO

Alamat : Jl. Raya Solo-Kartasura KM7 Surakarta 57102

Telp/ fax : (0271)724533 / (0271) 727270

E-mail : solo@jasatirta1.co.id

❖ **Kantor Divisi Jasa Umum**

Alamat : Jl. Surabaya 2A Malang 65115 PO.Box 39

Telp/ fax : (0341) 551971 / (0341) 551976

E-mail : dju@jasatirta1.co.id

❖ **Laboratorium Kualitas Air**

Alamat 1 : Jl. Surabaya 2A Malang 65115 PO.Box 39

Telp/ fax : (0341) 551971 ext.334 / (0341) 551976

Alamat 2 : Ds. Lengkong, Kec. Mojoanyar
Kab. Mojokerto, 61363

Telp/fax. : (0321) 331860 / (0321) 331860

❖ **KANTOR PERWAKILAN JAKARTA**

Alamat : Jl. Bendungan Hilir Raya Komplek KOPRO Banjir
No.18 Jakarta 10210

Telp/fax : (021) 5749473 / (021) 5737118

E-mail : jkt@jasatirta1.co.id

- d. Tugas pokok Perum Jasa Tirta I
- o Melaksanakan Pengusahaan Sumberdaya Air (SDA) di wilayah kerja
 - o Melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan SDA yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum.

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
1	K. Brantas	320.00
2	K. Amprong	31.70
3	K. Lesti	69.50
4	K. Metro	39.20
5	K. Lahor	27.40
6	K. Bambang	20.60
7	K. Lekso	18.80
8	K. Semut	21.40
9	K. Jari	12.50
10	K. Putih	19.20
11	K. Ewuh	18.90
12	K. Dawir	47.40
13	K. Parit Agung	54.80

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)
21	K. Badak	20.00
22	K. Serinjing	35.50
23	K. Konto	86.20
24	K. Kedak	14.10
25	K. Widas	129.00
26	K. Kedungsuko	23.80
27	K. Ulo	12.60
28	K. Kuncir	52.70
29	K. Bening	9.00
30	K. Beng	20.00
31	K. Watudakon	24.10
32	K. Brankal	53.50
33	K. Sadar	26.20



14	K. Parit Raya	15.60	34	K. Kambing	13.00
15	K. Ngrowo	10.80	35	K. Porong	62.50
16	K. Ngasinan	32.10	36	K. Marmoyo	43.50
17	K. Tawing	15.00	37	K. Surabaya	39.70
18	K. Tugu	18.00	38	K. Kedurus	13.20
19	K. Bodeng	20.00	39	K. Wonokromo	12.30
20	K. Song	21.50	40	K. Mas	13.20

Tabel 1. Wilayah Kerja Sungai Brantas

(Sumber : <http://www.jasatirta1.co.id>)

Daerah Pengaliran yang masuk wilayah kerja pada wilayah sungai Bengawan Solo; meliputi :

No	Nama	Panjang (km)	No	Nama	Panjang (km)	No	Nama	Panjang (km)
1.	Bengawan Solo	300,00	9.	Lohgede	2,00	17.	Catur	16,40
2.	Tirtomoyo	55,00	10.	Siwaluh	10,50	18.	Brangkal	15,60
3.	Keduwang	45,50	11.	Grompol	7,00	19.	Gandong	23,00

4.	Walikan	43,00	12.	Tempuran	4,00	20.	Kukur	6,00
5.	Dengkeng	67,00	13.	Gambiran	10,00	21.	Jungke	12,00
6.	Blora	5,50	14.	Madiun	300,00	22.	Ketonggo	5,00
7.	Ceper	7,00	15.	Ketegan	14,00	23.	Tinil	6,00
8.	Ujung	13,00	16.	Cemer	6,00	24.	Floodway Plangwot	12,50

Tabel 2. Wilayah Kerja Sungai Bengawan Solo

(Sumber : <http://www.jasatirta1.co.id>)

Hasil pembangunannya antara lain : Bendung Gunungsari baru, Bendung Gerak Jatimlerek, Bendung Gerak Mrican, Bendung karet Menturus, Bendung Lengkon Baru, Bendung Lodoyo, Bendungan Bening, Bendungan Colo, Bendungan lahor, Bendungan Selorejo, Bendungan Sengguruh, Bendungan Sutami, Bendungan Wlingi, Bendungan Wonogiri, Bendungan Wonorejo, Drainase Tulungagung



Gambar 4. Konsep Pengembangan Wilayah Sungai Brantas dan Wialayah Sungai Bengawan Solo

(Sumber : <http://www.jasatirta1.co.id>)

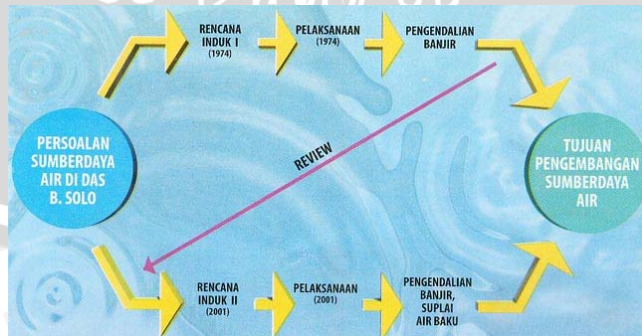
Dalam melakukan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air (SDA) yang meliputi pemeliharaan prasarana SDA, Perum Jasa Tirta I berpedoman pada konsepsi pengembangan wilayah sungai yang telah disusun.



Gambar 5. Konsep Pengembangan Wilayah Sungai Brantas.

(Sumber : <http://www.jasatirta1.co.id>)

Wilayah Sungai Brantas memiliki 5 Waduk Tahunan yaitu Waduk Sutami, Waduk Lahor, Waduk Wonorejo, Waduk Selorejo dan Waduk Bening. Ketersediaan air di Wilayah Sungai Kali Brantas sangat dipengaruhi oleh kondisi tampungan air di Waduk waduk tersebut



Gambar 6. Konsep Pengembangan Wilayah Sungai Bengawan Solo

(Sumber : <http://www.jasatirta1.co.id>)

Penambahan Wilayah Kerja Ws. Bengawan Solo Pada 14 September 2000 terbit Keppres Nomor 129 tahun 2000 dengan menambah wilayah kerja Perum Jasa Tirta I dengan WS Bengawan Solo.

f. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

g. Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan

Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan Perusahaan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- b. Penyediaan tenaga listrik kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar, dan jasa laboratorium kualitas air; dan
 - d. Pengembangan SPAM.
2. Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi, sumber daya energi, jasa konsultasi, jasa konstruksi, ekobisnis, pusat pelatihan, usaha pertanian, jasa penyewaan, dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan dikuasai Perusahaan.
- h. Pelayanan Jasa Air (Untuk PLTA, PDAM, & Konservasi)
 1. Pelayanan PLTA



Gambar 7. Grafik Produksi Listrik

(Sumber : <http://www.jasatirta1.co.id>)

Beberapa prasarana sumber daya air yang memiliki manfaat tenaga listrik adalah Bendungan Sengguruh, Bendungan Sutami,

Bendungan Wlingi, Bendung Lodoyo, Bendungan Wonorejo, Terowong Neyama, Bendungan Wonogiri, Golang, Giringan dan Telaga Ngebel.

2 Palayanan Air Baku untuk PDAM

Instalasi pengolahan Air (IPA) yang mengambil air baku dari Kali Brantas dan anak sungainya meliputi :

- PDAM Kota Surabaya
- PDAM Kab. Sidoarjo
- PDAM Kab. Gresik
- PDAM Kab. Malang
- PDAM Kab. Tulungagung
- PDAM Kab. Mojokerto

3. Palayanan Air Baku untuk Industri

PJT I menyuplai untuk industri. Perusahaan yang melakukan pengambilan di sepanjang sungai kali Brantas dan Bengawan Solo beserta anak sungainya wajib mengajukan ijin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

i. Pelayanan Jasa Non Air

Selain bergerak dalam sektor perusahaan Jasa Air, PJT I juga melakukan kegiatan usaha jasa non air meliputi :

1. Jasa Konstruksi & Sewa Peralatan

- Pengerukan waduk /sungai
- Pemancangan/pencabutan steel sheet pile

- Galian tanah
- Urugan tanah
- Pemancangan tiang pancang

2. Jasa Konsultasi

Adapun jenis konsultansi yang diberikan seperti pekerjaan studi kebijaksanaan berupa Kajian Rencana Induk (2001) Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Sungai, pekerjaan Inspeksi Awal dan Besar Bendungan, pekerjaan Kajian Penentuan Nilai Satuan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP SDA), pekerjaan Studi Kebijakan Arah Pengembangan Usaha BUMN PERUM di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Kali Porong serta Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai.

B. Penyajian Data Fokus

Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 dengan informan 1 yaitu bapak Tri Hardjono, SE sebagai Kepala Bag. Humas & PKBL, informan 2 yaitu Yusuf Wibisono, SE sebagai Pengatur, selanjutnya melakukan wawancara dengan *key informan* yaitu Pelaku Usaha yang menjadi ketua Tim dalam penyaluran dana yaitu bapak Sodikin Pelaku Industri Rengginang, yang dilaksanakan pada tanggal 06

Oktober 2013 yang bertempat di Jl. Kuncoro no 15 RT 23 RW 06 dalam waktu 1 hari, kemudian dibandingkan maupun diperkuat dengan teori-teori yang didapatkan dari hasil studi pustaka dari literatur-literatur dan pencarian data *online* (*internet searching*).

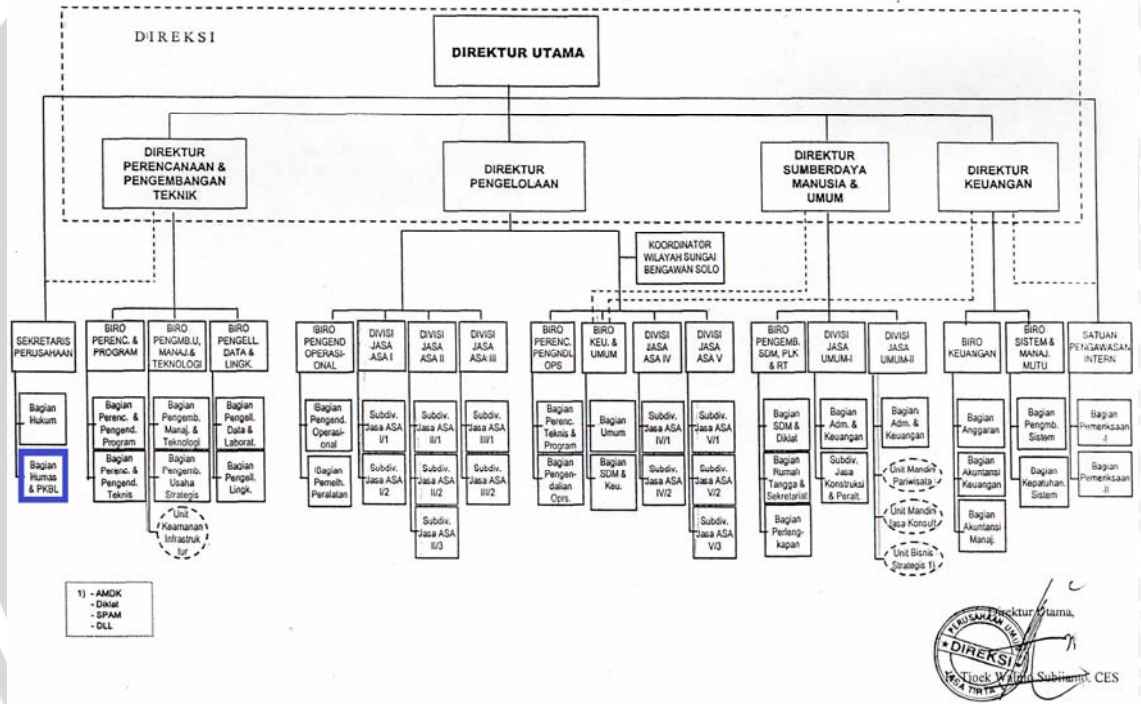
a. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

a) Organisasi pelaksana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)

Setiap BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang disebut BUMN Pembina berada dibawah pengawasan seorang direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : KP.124/KPTS/DU/2010 Tentang Pengaturan Kembali Organisasi Perusahaan, Tugas Pokok, Dan Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta I. Dalam melakukan pengelolaan dana Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jasa Tirta I dilaksanakan oleh bagian PKBL beserta staf dan dibantu oleh petugas yang ada dilapangan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : KP.081.2/KPTS/DU/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Dan Staf Yang Diperbantukan Dalam Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Di Lingkungan Perum Jasa Tirta I.

Jadi secara teoritis, struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi

perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui penjabaran dari fungsionaris mana yang bertanggung jawab untuk suatu kegiatan tertentu yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain itu setiap fungsionaris dapat mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggung jawab dalam susunan organisasi perusahaan, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih terarah.



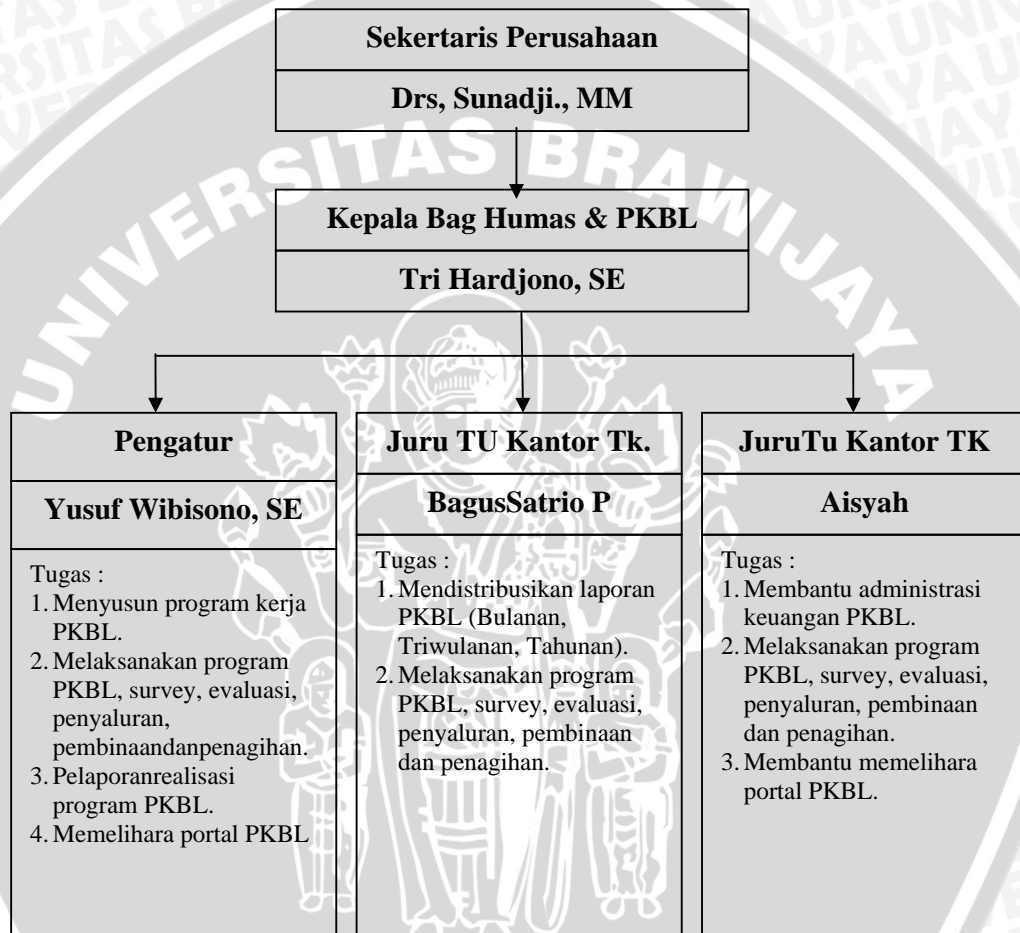
Gambar 8. Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta I

(Sumber :KP.124/KPTS/DU/2010)

: yang diteliti

Dari gambar diatas peneliti ingin menjelaskan secara rinci mengenai struktur organisasi Perum Jasa Tirta I secara fungsionaris

sehingga dapat mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggung jawab dalam susunan organisasi perusahaan seperti pada gambar berikutnya dibawah ini :



Gambar 9. Struktur Organisasi Bagian Humas dan PKBL Perum

Jasa Tirta I. (Sumber : KP.124/KPTS/DU/2010)

Dari gambar di atas secara struktural Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan Keputusan Direksi No. KP.124/KPTS/DU/2010 Tentang Pengaturan Kembali Organisasi Perusahaan, Tugas Pokok, Dan Wewenang Direksi Perum Jasa

Tirta I, menjelaskan bahwa secara garis besar Humas & PKBL mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran PKBL.
- b. Melakukan survey dan seleksi terhadap calon mitra binaan atau obyek yang akan dibantu.
- c. Memberi masukan kepada direksi tentang ketersediaan dana, calon mitra binaan dan obyek yang akan dibantu.
- d. Menyalurkan dana kemitraan dan bina lingkungan.
- e. Merintis, menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kerjasama dengan pihak terkait.
- f. Melakukan pembinaan terhadap mitra binaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PKBL.
- g. Menyiapkan laporan dan evaluasi realisasi PKBL.
- h. Mewakili perusahaan untuk mengikuti rapat-rapat bidang PKBL yang tidak mutlak harus dihadiri direksi.

Sehingga melihat penjelasan di atas peneliti mengetahui dan berusaha mempelajari bahwa dalam pelaksanaan PKBL harus ada unit sendiri yang nantinya secara umum dapat menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Khususnya dalam menangani pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang seharusnya memberikan kemudahan kepada para calon mitra binaan dan bina lingkungan untuk dapat berinteraksi dengan *stakeholders* sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan dampak yang positif bagi pembangunan perkonomian masyarakat di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang serta aspek-aspek lainnya.

- b) Program kerja organisasi dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada pasal 5 huruf c menjelaskan bahwa setiap BUMN pembina mempunyai “kewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”. Dalam penyusunannya dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dimana RKA yang dimaksud pada pasal 18 ayat 2 dalam Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dirinci menurut wilayah binaan.
- b. Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaannya dana sesuai dengan rencana kerja.
- c. Proyeksi posisi keuangan, laporan aktiva dan arus kas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Sehingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah disetujui RUPS/ Menteri langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu penetapan rencana penyaluran dana per provinsi. Berikut ini adalah informasi

program kerja dan realisasi dalam pelaksanaan PKBL periode berjalan selama tahun 2012.

1) Program Kemitraan

Program kemitraan diimplementasikan dalam bentuk pinjaman dan pendidikan / pelatihan serta pendampingan usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil. Dalam program kemitraan ini, para pengusaha kecil disejajarkan sebagai mitra binaan Perum Jasa Tirta I. Tercatat pada program kemitraan penyaluran dana kemitraan harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL PJT I tahun 2012. Sesuai informasi yang peneliti terima dari hasil wawancara kepada Bapak Yusuf yang merupakan salah satu Staff Pengatur Bagian Humas dan PKBL pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa:

“Selama setahun sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) usaha kecil / mitra binaan dengan perkiraan penyaluran sebesar Rp 1.350.000.000,-, namun realisasi dapat disalurkan kepada 286 (dua ratus delapan puluh enam) usaha kecil / mitra binaan termasuk koperasi berupa bantuan Pinjaman Modal Kerja, dan 2 (dua) kelompok tani dengan anggota 44 orang petani dengan total pinjaman sebesar Rp. 434.300.000,-.”

Sedangkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Program Kemitraan per 31 Desember 2012 dibanding dengan RKA PKBL tahun 2012 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Tabel 3. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan

Dana Program Kemitraan Tahun 2012

(Sumber : BKU Perum Jasa Tirta I Tahun 2012)

Sedangkan selama 3 bulan terakhir, tepatnya selama bulan juli sampai dengan september pada triwulan III tahun 2012 rencana penyaluran dana program kemitraan sesuai informasi yang peneliti terima dari hasil wawancara kepada Bapak Yusuf yang merupakan salah satu Staff Pengatur Bagian Humas dan PKBL pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa:

“Triwulan tersebut penyaluran dana kemitraan direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- sesuai RKA PKBL tahun 2012 dan dengan realisasi sebesar Rp 1.438.300.000,- yang disalurkan kepada 156 mitra binaan usaha kecil pada sektor perdagangan di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I di Jawa Timur, sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2012 penyaluran dana kemitraan sebesar Rp 2.227.050,- atau 175.01 % terhadap RKA PKBL sebesar Rp 1.272.500.000,- yang terdiri dari pinjaman modal kerja sebesar Rp 1.150.000.000,- dan biaya pembinaan dan pelatihan sebesar Rp 100.000.000 yang disalurkan kepada 230 mitra binaan usaha kecil pada sektor perdagangan di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I di Jawa Timur.”

Berikut rincian data mengenai penyaluran dana pada triwulan III :



Tabel 4. Realisasi Anggaran Dana Program Kemitraan

Triwulan III Tahun 2012

(Sumber : BKU Perum Jasa Tirta I)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 5. Daftar Penyaluran Dana Kemitraan Wilayah Kerja Perum
Jasa Tirta I Tahun 2012 (Sumber : PKBL Perum Jasa Tirta I)
: yang di teliti

Dari data di atas peneliti sedikit menjelaskann
mengenai jenis usaha mitra binaan Perum Jasa Tirta I dan
jumlah mitra binaan yang berlokasi di Kabupaten Malang.
Beriku ini adalah data secara rinci penerima dana Program
kemitraan di Kab. Malang :



Tabel 6. Daftar Penyaluran Dana Program Kemitraan Perum Jasa Tirta I

Untuk Wilayah Kab. Malang Tahun 2012

(Sumber : PKBL Perum Jasa Tirta I)



Dari data di atas mengenai program dan realisasi Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Kecil sudah dapat menjelaskan bahwa perbandingan tersebut jika dilihat dari aspek keuangan perusahaan menjelaskan bahwa Perum Jasa Tirta I memberikan kemudahan pelayanan yang artinya merupakan tahap awal dalam program kemitraan dengan memberikan pinjaman bagi usaha kecil yang memiliki dedikasi untuk berwirausaha, khususnya bagi usaha kecil yang belum dapat mengakses fasilitas perbankan yang komersial. Pinjaman yang diberikan terhadap Mitra Binaan bukanlah pinjaman yang komersial, sehingga persyaratan dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan Mitra Binaan Perum Jasa Tirta I. Pernyataan yang sama mengenai kemudahan akan pinjaman dana bagi mitra binaan ini diungkapkan oleh Bapak Sodikin yang merupakan perintis industri rengginang dalam hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 06 (enam) bulan oktober tahun 2013 yang menyatakan bahwa : "PKBL Perum Jasa Tirta I memberikan kemudahan bagi saya untuk mendapatkan akses pinjaman modal." Sehingga dari pernyataan tersebut dapat dijadikan bukti mutu bagaimana Perum Jasa Tirta memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman modal usaha.



Gambar 10. Mitra Binaan Usaha Kecil Penjual Rengginang

(Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2013)

Kepala Bagian Humas dan PKBL Perum Jasa Tirta I Bapak Tri Hardjono, SE juga menyatakan hal yang sama dalam hasil wawancara pada hari selasa tanggal 08 (delapan) bulan oktober tahun 2013 yang menyatakan bahwa : “Kemudahan prosedur peminjaman dinilai mitra-mitra binaan kami sebagai keunggulan Program Kemitraan Perum Jasa Tirta I ”. Melalui program kemitraan ini mitra binaan dipersiapkan untuk dapat membuat pembukuan dasar, manajemen sederhana, melakukan promosi dan pengemasan produk hasil produksinya. Pendidikan pada tahap selanjutnya diberikan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran produk mitra binaan Perum Jasa Tirta I. Selain program pelatihan mitra binaan juga mendapat bimbingan komprehensif selama satu tahun. Untuk memperluas pemasaran produk, Perum Jasa Tirta I mengikutsertakan mitra binaannya dalam berbagai pameran baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. Selain itu juga pemasarannya dibantu melalui

media promosi dalam bentuk pemasangan profil mitra binaan di media massa, maupun internet.



Gambar 11. Pelaksanaan Pameran Mitra Binaan
Perum Jasa Tirta I Tahun 2012

(Sumber : Dokumentasi Staff Humas & PKBL Tahun 2012)

Program kemitraan Perum Jasa Tirta I terutama dalam hal strategi penyaluran pinjaman dan pendampingan berusaha. Perum Jasa Tirta I menyadari bahwa penyaluran pinjaman program kemitraan yang kurang tepat sasaran memiliki resiko gagalnya pengembalian pinjaman. Hal ini disebabkan terutama karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan berusaha dari mitra binaan penerima pinjaman program kemitraan ini. Untuk memastikan agar mitra binaan Perum Jasa Tirta I mampu melakukan pengelolaan dan pengembangan usahanya dengan baik, yang akhirnya akan memperbaiki tingkat pengembalian pinjaman yang diberikan, maka perusahaan harus

memiliki kemampuan dan komitmen untuk melakukan pembinaan usaha secara berkesinambungan terhadap mitra usaha mereka.

Informasi yang peneliti terima bahwa penyaluran pinjaman modal kerja dilakukan secara cluster/kelompok, dimana setiap kelompok beranggotakan \pm 8 sampai 15 orang selanjutnya dipimpin oleh seorang ketua yang dianggap mampu dan menjadi penanggung jawab. Sehingga di dalam surat perjanjian yang tanda tangan adalah ketua kelompok dan pada lampiran di tanda tangani oleh seluruh anggota, dengan harapan agar tidak terjadi pinjaman macet atau bermasalah.



Gambar 12. Penandatanganan Kontrak Mitra Binaan Di Desa

Sambi Gede Kec. Sumber Pucung Kab. Malang

(Sumber : Dokumentasi Staff Humas & PKBL Tahun 2012)

Selain itu dari informasi diatas, hasil wawancara dengan staff PKBL Bapak Yusuf pada hari kamis tanggal 10 (sepuluh) bulan oktober tahun 2013, juga memberi informasi bahwa dalam kegiatan pembinaan kemitraan, bagian PKBL Perum Jasa Tirta I bekerja sama dengan Perguruan Tinggi / Universitas / Yayasan. Kegiatan yang dikakukan antara lain meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan/ pelatihan, dengan materi pelatihan yang dapat dipahami oleh semua mitra binaan.
2. Melakukan kunjungan lapangan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendidikan/ pelatihan yang bertujuan untuk membantu mitra binaan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam usahanya.
3. Kegiatan ini dilakukan secara periodik, berkelanjutan dan berkesinambungan antara materi yang telah diberikan selama pelatihan dengan penerapannya yang biasanya dilakukan selama 2 (dua) tahun.
4. Untuk mendorong kemajuan usahanya bagian PKBL juga melaksanakan program pemasaran melalui pameran, namun masih dalam skala kecil dan jangkauan pasar yang terbatas, namun terus dilakukan dan ditingkatkan.

Untuk menunjang kemampuan dan komitmen dalam melakukan pembinaan usaha secara berkesinambungan terhadap mitra usaha, Perum Jasa Tirta I melakukan pembinaan yang terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) Lembaga Perguruan Tinggi yaitu : Universitas Kediri, Universitas Merdeka Madiun, Universitas Kanjuruhan Malang, STIE Malang Kucewara dan 1 (satu) Yayasan PUSAKA, dimana lokasi pembinaan di wilayah Provinsi Jawa timur dan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah daftar lokasi klaster binaan PKBL PJT I dan biaya pembinaan selama 2 (dua) tahun terakhir:

Biaya Pembinaan dan Pelatihan		2012	2011
Mitra Binaan		125.500.000	96.280.000

Tabel 7. Perbandingan Biaya Pembinaan Tahun 2011 dan 2012

(Sumber : BKU Perum Jasa Tirta I)

NO	KELOMPOK USAHA	LOKASI PENYALURAN	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)	TOTAL DANA YANG TERSALURKAN (Rp)	KETERANGAN / PEMBINA
1	Pedagang warung makan	Desa Banturejo Kec. Ngantang Kab Malang	25	250,000,000.00	Universitas brawijaya
2	Industri makanan rengginang dan warung makan	Desa Sambigede Kec. Sb. Pucung Kab. Malang	29	219,000,000.00	Univ. Kanjuruhan
3	Perdagangan dan warung sembako	Desa Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun	19	125,000,000.00	Unmer Madiun
4	Peternak bebek/itik	Desa Tawangrenjeni Kec. Turen Kab. Malang	14	145,000,000.00	Universitas brawijaya
5	Perdagangan toko sembako	Ds. Ked. Cangkring Kec. Pagerwojo Kab.T.agung	13	144,000,000.00	Unika Kediri
6	Koprasi dan perdagangan	Desa Jegu Kec. Sutojaya, Desa Bangle Kec. Kanigoro Kab. Blitar	19	218,000,000.00	Unika Kediri
7	Perdagangan dan jasa	Desa Sengguruh Kec. Kepanjen Kab. Malang	14	106,000,000.00	Universitas brawijaya
8	Perdagangan dan warung sembako	Desa Sukorame Kec. Mojojot Kab Kediri	18	102,000,000.00	STIE Malang Kuciwara
9	Industri sarung tangan	Desa Parengan Kec. Madura Kab. Lamongan	15	220,000,000.00	Univ. Kanjuruhan
10	Industri makanan jajanan khas trenggalek	Desa Bondorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek	20	180,000,000.00	Unika Kediri
11	Pertanian	Desa Karangsono Kec. Kanigoro Kab. Blitar	10	119,000,000.00	Universitas brawijaya
12	Pertanian	Desa Kauman Kec. Baureno Kab. Bojonegoro	34	310,000,000.00	-
13	Industri makanan mente	Desa Pondok Kec. Ngadirejo Kab. Wonogiri	20	189,000,000.00	Unmer Madiun
14	Industri kain batik malang	Desa Ngadirejo Kec. Kromengan Kab. Malang	10	50,000,000.00	Universitas brawijaya
15	Industri makanan kripik singkong	Desa Kwangsen Kec. Jiwan Kab. Madiun	19	130,000,000.00	
16	Industri makanan opak gambir	Desa Bujel Kec.Mojoroto Kab. Kediri	7	70,000,000.00	Unika Kediri
Jumlah				2,577,000,000.00	

Tabel 8. Daftar dan Lokasi Kluster Bina PKBL

Perum Jasa Tirta I Tahun 2012

(Sumber : PKBL Perum Jasa Tirta I)

 : yang diteliti



Gambar 13. Pelaksanaan Pembinaan Oleh LPPM

Universitas Kanjuruhan Malang

(Sumber : Dokumentasi Staff Humas & PKBL Tahun 2012)

2) Program Bina Lingkungan

Kegiatan program bina lingkungan (BL) Perum Jasa Tirta I secara umum mencakup enam bidang yaitu:

1. Bencana Alam, yang dilaksanakan untuk meringankan beban para korban bencana alam serta pemulihan kondisi pasca bencana.
2. Pendidikan dan Pelatihan, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas fasilitas umum.
4. Kesehatan, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Sarana Ibadah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah dan mendukung kegiatan keagamaan masyarakat.
6. Pelestarian Alam, dalam upaya untuk merehabilitasi atau menjaga kelestarian sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selama setahun terakhir ini, rencana penggunaan dana Program Bina Lingkungan juga sudah disusun sesuai dengan RKA PKBL tahun 2012 sebesar Rp 850.000.000,- dan realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan sebesar Rp 627.980.000,- disalurkan diwilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini adalah realisasi dan penggunaan dana Bina Lingkungan per 31 Desember 2012 dibandingkandengan RKA PKBL tahun 2012:

Jumlah Dana Yang Tersedia & Penggunaan Dana	TAHUN 2012		% TERHADAP ANGGARAN
	REALISASI	ANGGARAN RKA-BL	
DANA YANG TERSEDIA			
Penghimpunan Dana			
- Sumber dana awal per 01/01/2012	396,045,618	418,317,290	94.68
- Penyisihan laba per tahun buku 2011	868,700,000	822,200,000	105.66
- Penerimaan bunga tabungan	8,367,109	4,000,000	209.18
- Penerimaan lain-lain	-	-	-
JUMLAH DANA YANG TERSEDIA	1,273,112,727	1,244,517,290	102.30
PENGGUNA DANA			
Bantuan / hibah			
- Biaya Pendidikan / Beasiswa	60,480,000	150,000,000	40.32
- Bencana alam	-	100,000,000	-
- Kegiatan keagamaan	2,500,000	75,000,000	3.33
- Kegiatan pelestarian alam	-	100,000,000	-
- Bantuan sarana & prasarana	517,500,000	350,000,000	147.86
- Kegiatan bantuan kesehatan	47,500,000	75,000,000	63.33
SUB JUMLAH	627,980,000	850,000,000	73.88
Beban Operasional Bina Lingkungan			
- Beban Adm. Bank dan lain-lain	1,733,426	10,000,000	17.33
JUMLAH PENGGUNA DANA	629,713,426	860,000,000	73.22
Rekening BUMN PEDULI	380,510,000	0	
SALDO DANA PER 31/12/12	262,889,301	384,517,290	

Tabel 9. Realisasi dan Pengguna Dana Bina Lingkungan

Perum Jasa Tirta I Tahun 2012.

(Sumber : PKBL Perum Jasa Tirta I)

Sedangkan dalam rencana kerja penyaluran dana Bina Lingkungan pada triwulan III tahun 2012, hasil wawancara kepada Bapak Yusuf yang merupakan salah satu Staff Pengatur Bagian Humas dan PKBL pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa:

“di rencanakan sebesar Rp 252.500.000,- sesuai RKA PKBL tahun 2012. Penyaluran dana Bina Lingkungan pada triwulan III sebesar Rp 313.180.000,- untuk bantuan sarana dan prasarana umum, dan peningkatan kesehatan dan bantuan beasiswa untuk anak keluarga tidak mampu di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I.”

Sedangkan rencana anggaran yang terealisasi dana Bina Lingkungan yang terhimpun samapi dengan triwulan III sebesar Rp 1.272.839.336 dan penggunaan Bina Lingkungan sebesar Rp 400.680.000,- dan administrasi sebesar Rp 1.678.749,- sehingga saldo Bina Lingkungan BUMN pembina sebesar Rp 488.922.016,- dan BUMN Peduli sebesar Rp 381.558.571,-. Sumber dana dan penggunaan program Bina Lingkungan sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI Rp
A	Dana Yang Tersedia	
	1 Saldo awal per 1 Januari 2012	396.045.618
	2 Penerimaan	
	a Bagian laba tahun 2011	
	- Dikelolah Perusahaan (70%)	608.090.000
	- Dana u/ BUMN Peduli (30%)	260.010.000
	b Jasa giro / bunga bank	8.093.718
	c Lain - lain	-
	Jumlah Dana Yang Tersedia : (A)	1.272.839.336
B	Pengguna Dana :	
	1 Program Bina Lingkungan	
	a Bantuan biaya pendidikan / pelatihan	
	- Biaya pendidikan / beasiswa	37.680.000
	- Pelatihan u/ peningkatan keterampilan	-
	b Bantuan korban bencana alam	-
	c Pelestarian alam	-
	d Sarana dan Prasarana Umum	310.500.000
	e Peningkatan Kesehatan	52.500.000
	f Sarana Ibadah / Kegiatan keagamaan	-
	Jumlah bantuan Bina Lingkungan	400.680.000
	2 Biaya bank dan biaya operasional	
	a Biaya operasional	-
	b Biaya administrasi bank	1.678.749
	c Biaya lain-lain	-
	Jumlah biaya bank dan biaya operasional	1.678.749
	Jumlah Pengguna Dana : (B)	402.059.104
	3 Program BUMN Peduli	381.558.571
C	Saldo Akhir Triwulan II : (A-B)	488.922.016

Tabel 10. Sumber Dana dan Pengguna Program Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I Tahun 2012

(Sumber : PKBL Perum Jasa Tirta I)

NO	NAMA SEKOLAH/ YAYASAN	ALAMAT	PERIHAL	JUMLAH BANTUAN
1	Komandan Koramil 0818/06	Sumber Pucung - Kab. Malang	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Musholah	10,000,000
2	Ketua Panitia Pembangunan Musholah Al-Mukodas	Al. Mukodas Jl Sumberayu Karangates Kab. Malang	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Paving Masjid	10,000,000
3	Lembaga Pendidikan Putra Harapan Bangsa SMK Putra Bangsa Pagak	Jl. Sidodadi Gampingan Pagak Kab. Malang	Beasiswa SMK	15,000,000
4	Panitia Pembangunan Ponpes Nurul Wahid	Jl Imam Bonjol No 006 RT 17 RW 02 Bengkaras Desa Madirejo Kec. Pujon Kab. Malang	Bantuan Dana Pembangunan Pondok Pesantren	10,000,000
5	Panitia Pembangunan Langgar Waqof	Jl. Pedepokan, Senggruh Kepanjen, Malang	Bantuan Dana Pembangunan Langgar Waqof	10,000,000
6	SMP Negeri I Kalipare	Jl. Raya Ngembul 183 Kalipare Kab. Malang	Beasiswa	14,400,000
7	SD Negeri Suwaru	Jl. Raya No. 05 Desa Suwaru Kec. Pagelaran - Kab. Malang	Beasiswa	8,280,000

Tabel 11. Daftar Penyaluran Dana Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I Wilayah Kab. Malang Tahun 2012 (Sumber PKBL Perum Jasa Tirta I)

: yang diteliti



Gambar 14. Pelaksanaan Pembangunan Musholah

(Sumber : Dokumentasi Staff Humas & PKBL Tahun 2012)

c) Tata Cara Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) harus diwujudkan sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perum Jasa Tirta I dan harus dilaksanakan secara terarah, terstruktur, melibatkan seluruh karyawan serta mampu meningkatkan *corporate image* dan *corporate business* perusahaan secara maksimal. Untuk itu dalam hal ini masih ada kaitannya dengan Tata Cara Pelaksanaan Program Kemitraan yang efisien dan efektif, dimana harus dilakukan secara langsung, bekerja sama / dengan instansi terkait, UMKM pada tingkat kota dan kabupaten. Tidak jauh berbeda dengan Tata Cara Pelaksanaan Program Bina Lingkungan, untuk Program Bina Lingkungan pelaksanaannya juga selalu berkoordinasi dengan instansi / dinas terkait dalam hal pengajuan dana Program Bina Lingkungan, karena setiap rencana kerja senantiasa disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan KPTS Direksi No.KP.053/KPTS/DU/2010 Tanggal 14 Mei 2010 tentang Pedoman Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Perum Jasa Tirta I adalah sebagai berikut :

1. Proses Penyaluran & Monitoring Dana Kemitraan
 - 1.1 Calon Mitra Binaan usaha kecil mengajukan proposal kepada Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Melalui :
 - a. Bagian Humas dan PKBL kemudian disampaikan kepada Sekretaris Keuangan
 - b. Kepala Divisi Jasa Asa kemudian disampaikan kepada Bagian Humas & PKBL untuk didata dan diinventarisasi, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan.
 - 1.2 Isi Proposal Calon Mitra Binaan Usaha Kecil minimal harus meliputi:
 - a. Nama dan alamat unit usaha
 - b. Nama dan alamat pemilik / pengurus unit usahanya
 - c. Bukti identitas (KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku)
 - d. Bidang usaha
 - e. Izin usaha atau surat keterangan dari pihak yang berwenang (jika ada).
 - f. Data perkembangan usaha yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usahanya.
 - g. Rencana penggunaan dana bantuan / pinjaman dan kebutuhan dana.
 - 1.3 Pelaksanaan Observasi, pemeriksaan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan calon Mitra Binaan Usaha Kecil dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan langsung mengenai aspek-aspek usaha kecil dan prospek usahanya oleh :
 - a. Bagian Humas dan PKBL apabila calon Mitra Binaan Usaha Kecil.
 - b. Bagian Humas dan PKBL bersama-sama dengan Staff Divisi apabila calon mitra binaan usaha kecil berlokasi di lingkungan Divisi Jasa Asa.
 - 1.4 Hasil Observasi, pemeriksaan, evaluasi dan seleksi calon Mitra Binaan Usaha Kecil dicatat dan direkap dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk dilakukan pembahasan tentang kelayakan calon Mitra Binaan Usaha Kecil.
 - 1.5 Sekretaris Perusahaan menyampaikan hasil pembahasan kepada Direktur Pengembangan dan Perencanaan Teknik sebagai pertimbangan dalam menentukan apakah calon Mitra Binaan Usaha Kecil layak bina (dibantu) atau tidak.
 - 1.6 Berdaarkan persetujuan Direktur Direktur Pengembangan dan Perencanaan Teknik, Bagian Humas dan PKBL membuat konsep KPTS / Memo Dinas / Surat tentang Program Penyaluran Dana

- Bantuan Untuk Mitra Usaha Kecil Yang disampaikan kepada Direksi melalui Sekretaris Perusahaan untuk ditetapkan dengan KPTS Direksi.
- 1.7 Bagian Humas & PKBL mendistribusikan KPTS Direksi tentang Program Penyaluran Dana Bantuan untuk Mitra Binaan Usaha Kecil Kepada SPI, Biro Keuangan dan Divisi Jasa Asa terkait.
 - 1.8 Berdasarkan Keputusan Direksi tentang Program Penyaluran Dana, Bagian Humas & PKBL menyiapkan syarat kelengkapan Administrasi, yaitu :
 - a. Perjanjian modal kerja
 - b. Jadwal pembayaran dan besar angsuran
 - c. Kwitansi pembayaran bantuan dana
 - d. Aplikasi kiriman uang melauai bank
 - 1.9 Perjanjian Modal Kerja ditandatangani antara Mitra Binaan Usaha Kecil dengan Kepala Bagian Humas & PKBL dan Diketahui oleh Sekretaris Perusahaan.
 - 1.10 Setelah penandatanganan Perjanjian Modal Kerja, dilaksanakan pencairan dana melalui tranfer Bank pada rekening Mitra Binaan Usaha Kecil.
 - 1.11 Mitra Binaan Usaha Kecil wajib membayar angsuran sesuai dengan perjanjian modal kerja pada Bagian Humas & PKBL melalui staf Divisi Jasa Asa terkait atau melalui tranfer bank pada rekening Bagian Humas & PKBL.
 - 1.12 Bagian Humas & PKBL bersama Divisi Jasa Asa terkait melakukan monitoring pelaksanaan pembinaan & kelancaran pembayaran angsuran dari mitra binaan usaha kecil.
 - 1.13 Apabila mitra binaan usaha kecil ada yang menunggak, Bagian Humas & PKBL menerbitkan surat peringatan/ teguran kepada mitra binaan usaha kecil dengan tembusan kepada sekreteris perusahaan, Divisi Jasa Asa terkait (sebagai Laporan).
 - 1.14 Sekretaris Perusahaan membuat laporan realisasi penyaluran dana kemitraan disampaikan kepada direksi dengan tembusan kepada Biro Keuangan, SPI & Divisi Jasa Asa Terkait
 - 1.15 Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud angka 14, direksi membuat laporan realisasi triwulan dan tahunan program kemitraan kepada Menteri BUMN dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- 2 Proses Penyaluran Dana Bina Lingkungan.
 - 2.1 Calon penerima dana Bina Lingkungan mengajukan proposal kepada direktur utama PJT I melalui :
 - a. Bagian Humas dan PKBL kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan atau,
 - b. Kepala Divisi Jasa Asa kemudian disampaikan Bagian Humas dan PKBL untuk didata dan diinventarisasikan, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan
 - 2.2 Isi proposal calon penerima dana Bina Lingkungan minimal harus memuat :
 - a. Nama perorangan, kelompok, lembaga atau badan usaha
 - b. Alamat pemohon
 - c. Besar dana yang diperlukan
 - d. Peruntukan bantuan.
 - 2.3 Pelaksanaan observasi, pemeriksaan, evaluasi, dan seleksi atas permohonan yang diajukan calon penerima dan bina lingkungan dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap kebutuhan canon penerima dana bina lingkungan oleh:
 - a. Bagian PKBL apabila calon penerima bina lingkungan berlokasi di sekitar lingkungan kantor pusat
 - b. Bagian PKBL bersama-sama dengan Staff Divisi apabila calon mitra binaan usaha kecil berlokasi di sekitar Divisi Jasa Asa.
 - 2.4 Hasil observasi, pemeriksaan, evaluasi dan seleksi calon mitra binaan usaha kecil dicatat & direkap dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk dilakukan pembahasan tentang kelayakan calon penerima dana Bina Lingkungan.
 - 2.5 Sekretaris Perusahaan menyampaikan hasil pembahasan kepada Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknik sebagai pertimbangan dalam menentukan apakah calon penerima dana Bina Lingkungan layak bina (dibantu) atau tidak.
 - 2.6 Berdasarkan persetujuan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknik, Bagian Humas dan PKBL membuat konsep KPTS / Memo Dinas / Surat tentang Program penyaluran dana bantuan untuk penerimaan dana Bina Lingkungan yang disampaikan kepada Direksi melalui Sekretaris Perusahaan untuk ditetapkan dengan KPTS Direksi.

- 2.7 Bagian Humas dan PKBL mendistribusikan KPTS Direksi tentang program penyaluran Dana Bina Lingkungan untuk penerima dana Bina Lingkungan Kepada SPI, Biro Keuangan dan Divisi Jasa Asa terkait.
 - 2.8 Berdasarkan KPTS / Memo Dinas / Surat tentang program penyaluran, bagian PKBL menyiapkan syarat kelengkapan administrasi yaitu :
 - a. Berita acara serah terima bantuan
 - b. Kwitansi pembayaran bantuan dana.
 - 2.9 Berita acara serah terima bantuan ditandatangani antara penerima dana Bina Lingkungan dengan Kepala Bagian Humas dan PKBL dan diketahui oleh Sekretaris Perusahaan
 - 2.10 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan, dilaksanakan penyerahan bantuan kepada penerima dana Bina Lingkungan dengan disaksikan oleh staff Divisi Jasa Asa terkait.
 - 2.11 Sekretaris Perusahaan membuat laporan realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan disampaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Biro Keuangan, SPI, & Divisi Jasa Asa Terkait.
 - 2.12 Atas dasar laporan sebagaimana dimaksudkan angka 11, Direksi membuat laporan realisasi Triwulan dan Tahunan Program Bina Lingkungan dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- d) Output dan Outcome Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jasa Tirta I

Sebagai salah satu BUMN yang mempunyai keuntungan dan dibawah kementerian BUMN wajib untuk mengalokasikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu *output* dan *outcome* dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I harus lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam penerapannya yang sesuai dengan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomer : PER 05/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007

tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dapat dilaksanakan kegiatan tersebut dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut peneliti, secara umum Program Kemitraan Perum Jasa Tirta I dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, merupakan salah satu contoh yang dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dimana yang seharusnya keberhasilannya dapat dilihat dari dua indikator, yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
2. Terbangunnya sarana dan prasarana umum.

Sedangkan hasil yang diharapkan secara umum dari *output* diatas yaitu *outcome* program ini adalah:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat
2. Tersedianya fasilitas sarana prasarana yang lengkap sesuai kebutuhan masyarakat

Lebih spesifik lagi, Kepala Bagian Humas dan PKBL Perum Jasa Tirta I Bapak Tri Hardjono, SE menyatakan dalam hasil wawancara pada hari jumat tanggal 18 (delapan belas) bulan oktober tahun 2013, bahwa Program Kemitraan Perum Jasa Tirta I dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang

ingin mencapai keberhasilan memandirikan masyarakat dengan indikator yang lebih jauh, yaitu:

1. Terbangunnya industri kreatif berbasis rumah tangga.
2. Tersedianya produk-produk unggulan yang mempunyai nilai jual di masyarakat.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana yang lengkap

Kalau peneliti telaah lebih jauh, sesungguhnya Program Kemitraan Perum Jasa Tirta I dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan inti programnya menyangkut 2 hal penting, yaitu ekonomi dan sosial. Masing-masing bidang untuk masing-masing wilayah pilihan pengembangannya tentu berbeda-beda tergantung permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang penting yang telah disepakati bersama. Sehingga secara khusus peneliti ingin mengetahui secara rinci *output* dan *outcome* dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I studi kasus pada Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan PKBL Perum Jasa Tirta I Bapak Tri Hardjono, SE pada hari jumat tanggal 18 (delapan belas) bulan oktober tahun 2013.

A. Output Bidang Ekonomi

1. Terbangunnya pemberdayaan masyarakat dan berbagai kelompok usaha yang ada di desa.
2. Berkembangnya usaha para pedagang kecil
3. Meningkatnya daya saing usaha sektor-sektor.

Indikator :

1. Tersedianya usaha kreatif masyarakat lokal.

2. Tersedianya jenis-jenis pengembangan usaha yang dibutuhkan di desa.
3. Terlaksananya berbagai jenis pelatihan keterampilan bagi para pelaku dan pekerja industri kecil di desa.
 - a. Terbentuknya kelembagaan bagi usaha masyarakat.
 - b. Terbangunnya jejaring pendukung bagi usaha masyarakat.
 - c. Tersedianya bantuan usaha dan pelatihan penambahan nilai bagi produk unggulan daerah.
 - d. Tersedianya kebutuhan para pelaku pedagang kecil di desa.
 - e. Tersedianya fasilitas usaha masyarakat pedagang kecil.
 - f. Tersedianya informasi peluang pasar

B. Output Bidang Sosial

1. Meningkatnya sarana dan prasarana umum.

Indikator :

1. Tersedianya fasilitas ibadah.



Gambar 15. Hasil Produksi Unggulan Desa Sambi Gedhe

Kec. Sumber Pucung Kab. Malang

(Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2013)

- b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

Program kemitraan merupakan wadah untuk pengembangan UKM dikarenakan program ini dapat menjawab dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini dialami oleh UKM di Indonesia khususnya dalam hal ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I yang peneliti fokuskan pada daerah Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, dimana mengingat daerah tersebut jauh dari kota dan merupakan daerah sekitar wilayah kerja Perum Jasa Tirta I. Secara umum cara mengembangkan UKM sangat susah dimana permasalahan utamanya adalah belum dapat mengakses fasilitas perbankan yang komersial dalam bentuk suatu modal usaha dan pengetahuan tentang usaha, untuk itu mekanisme dan struktur kelembagaan kemitraan diatur berdasarkan KEP-2361MBU/2003 yang merupakan peraturan terbaru dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat memenuhi harapan pelaku UKM. Dimana yang dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan

keuangan. Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan di Perum Jasa Tirta I dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola / 2% dari penyisihan laba setelah pajak yang tercantum sesuai dalam PER-05/MBU/2007, serta mempertimbangkan kondisi perusahaan. Sedangkan bentuk pelaksanaan di Kantor Divisi khususnya Divisi Jasa Asa I yang bertanggung jawab terhadap binaan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

- a. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

Faktor pendukung pelaksanaan CSR pada Perum Jasa Tirta I Malang yaitu adanya dukungan *stakeholder*, antara lain pengelola perusahaan, LSM, pemerintah serta masyarakat memperlancar berjalannya program ini. Sehingga dalam menyelenggarakan kegiatan pemerataan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat. Selain itu, adanya komitmen yang tinggi dari karyawan yang ingin merangkul masyarakat sekitar agar program PKBL ini lebih bermanfaat untuk masyarakat terutama di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten

Malang. Serta Program kerja yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Perum Jasa Tirta I Malang selalu mencoba memberikan inovasi-inovasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

- b. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

Faktor Penghambat pelaksanaan CSR Perum Jasa Tirta I Malang yaitu program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Hal ini menyebabkan program CSR belum bergulir sebagai mana mestinya, mengingat masyarakat umum belum mengetahui maupun mengerti apa itu program CSR, apa saja yang dapat dilakukannya dan bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi dengan prosedur perusahaan dan LSM yang bekerja sama dengan perusahaan. Hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dari perusahaan kepada masyarakat sekitar pada khususnya.

Sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungannya, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menjalankan kehidupan berbisnis dan masih dihindangi dengan pemikiran-pemikiran masa lampau, bahwa suatu bentuk bantuan diberikan itu hanya berbentuk

santunan konsumtif yang tidak ada kelanjutannya. Di sinilah dibutuhkan peran perusahaan sebagai pembina di mana perusahaan sebagai aktor sekaligus fasilitator serta motivator membangun sinergi dengan masyarakat.

Kemudian, perusahaan harus betul-betul memonitoring mitra binaannya dan kinerja lembaga LSM yang bekerja sama dengan perusahaan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan karena masyarakat masih banyak yang berpandangan, bahwa kehidupan berwirausaha itu kurang begitu menguntungkan bagi mereka, mereka lebih baik hidup sebagai petani, buruh atau pekerja yang berpenghasilan sedikit dari pada harus berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai wirausahawan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang relatif rendah dari pembayaran angsuran, termasuk kompetensi mitra binaan dalam ruang pemasaran untuk meraih peluang. Faktor penghambat lainnya, masih ada sebagian masyarakat yang sulit diajak untuk berkembang sehingga menyebabkan angsuran macet.

- c. Dampak yang muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.
 - a) Dampak dari Program Kemitraan

Program Kemitraan bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil yang dilihat dari peningkatan pendapatan pertahun setelah menjadi mitra binaan Perum Jasa Tirta I Malang. Dari data tahun 2012-2013 pendapatan perbulan mitra binaan seharusnya dapat menjadi kunci secara kumulatif dalam pendapatan pertahun nantinya, sehingga pinjaman yang diberikan oleh Perum Jasa Tirta melalui Program Kemitraan serta binaan-binaan yang dilakukan oleh LSM yang terkait dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil baik dalam sektor financial maupun materil. Berikut ini adalah tabel mengenai kondisi pendapatan binaan usaha kecil Perum Jasa Tirta I Malang di Di Desa Sambu Gede Kec. Sumber Pucung Kab. Malang yang sudah peneliti olah dari data angsuran perbulan yang dibayarkan dari mitra binaan kepada Perum Jasa Tirta I

NO	NAMA	JENIS USAHA	BANTUAN MODAL (Rp)	BESARAN ANGSURAN PER BULAN (Rp)	JANGKA WAKTU ANGSURAN (BLN)	PENDAPATAN PERTAHUN (Rp)	LABA BERSIH PERBULAN (Rp)
1	Djemi H. Enoch	Pedagang Gabah/ Beras	8,000,000	376,000	24	218,400,000	18,200,000
2	Sudjai	Warung Tahu Lontong	5,000,000	235,000	24	78,000,000	6,500,000
3	Saimah	Industri Rengginang	7,000,000	327,000	24	23,400,000	1,950,000
4	Sunarmi	Industri Rengginang	15,000,000	700,000	24	24,960,000	2,080,000
5	Miseni	Toko Prancang	6,000,000	280,000	24	93,000,000	7,800,000
6	Danang	Industri Roti Bolen	5,000,000	235,000	24	218,400,000	18,200,000
7	Suliatim	Pedagang Angsle	2,000,000	95,000	24	31,200,000	2,600,000
8	Suliyas	Toko Prancang	5,000,000	235,000	24	109,200,000	9,100,000
9	Suyanto	Toko Klontong	5,000,000	235,000	24	209,200,000	19,100,000
10	Samiyem	Industri Rengginang	5,000,000	376,000	24	15,600,000	1,300,000
11	Pujiono	Pedagang Ayam	5,000,000	235,000	24	156,000,000	13,000,000
12	Sutris	Industri Rengginang	5,000,000	235,000	24	78,000,000	6,500,000
13	Sulikhah Eka Cahyani	Toko Prancang	5,000,000	235,000	24	124,800,000	10,400,000
14	Dian Palupi	Toko Material	10,000,000	470,000	24	234,000,000	19,500,000
15	Arief Nugroho	Counter	5,000,000	235,000	24	43,200,000	3,600,000
16	Sukadi	Toko Prancang	5,000,000	235,000	24	234,000,000	19,500,000
17	Tunah	Industri Rengginang	4,000,000	187,000	24	93,600,000	7,800,000
18	Afo Suradi	Pedagang Beras	5,000,000	235,000	24	3,432,000,000	286,000,000
19	Sodiqin	Industri Rengginang	4,000,000	187,000	24	18,720,000	1,560,000
20	Vivin yuliasih	Toko	5,000,000	235,000	24	124,800,000	10,400,000

Tabel 12. Daftar Angsuran dan Pendapatan Mitra Binaan Perum
Jasa Tirta I Desa Sambi Gedhe Kec. Sumber Pucung Kab. Malang
(Sumber : PKBL Perum Jasa Tirta I)

Data di atas merupakan data tentang kondisi binaan-binaan Perum Jasa Tirta I Malang khususnya di Desa Sambi Gede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tahun 2012-2013 per 31 Juni 2013. Di dalam data tersebut menunjukkan kondisi pendapatan mitra binaan selama perbulan yang di kumulatifkan nantinya selama setahun, serta besaran angsuran yang nantinya harus dibayarkan kepada Perum Jasa Tirta I Malang selaku pelaksana teknis Program Kemitraan. Dari data keseluruhan dari mitra binaan di Desa Sambi Gede Kecamatan Sumberpucung

Kabupaten Malang mengalami peningkatan pendapatan dan secara tidak langsung para mitra binaan dapat membayar angsuran pinjaman tepat waktu.

Peningkatan pendapatan diungkapkan oleh salah satu mitra binaan yaitu Ibu Vivin yang memiliki jenis usaha toko, berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari sabtu tanggal 13 (tiga belas) bulan oktober tahun 2013 :

“Usaha saya mengalami peningkatan omset yang dampaknya langsung kepada pendapatan perbulan setelah menjadi mitra binaan Perum Jasa Tirta I. karena setelah mendapat pinjaman modal usaha bertambah sehingga barang-barang usaha saya juga semakin banyak dan lengkap.”

Mitra binaan lainnya juga membenarkan hal itu yaitu bapak Sodikin yang memiliki jenis usaha perdagangan, berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari sabtu tanggal 13 (tiga belas) bulan oktober tahun 2013:

“Setelah usaha saya menjadi mitra binaan Perum Jasa Tirta I Malang ada peningkatan pendapatan. Hal ini mungkin terjadi karena modal awal saya menjadi pedagang rengginang cukup sedikit sedangkan permintaan di pasar sangat tinggi, sehingga dengan bantuan modal usaha oleh Perum Jasa Tirta I, saya memiliki pekerja yang membantu saya dan bahan baku untuk memenuhi permintaan pasar sudah dapat diatasi”

Jadi pada intinya program kemitraan dapat berdampak positif terutama pada peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat khususnya mitra binaan Perum Jasa Tirta I Malang di Desa Sambi Gede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

b) Dampak dari Program Bina Lingkungan

Dampak Program Bina lingkungan dapat dilihat dari peningkatan sarana dan prasarana di dalam masyarakat yang terlingkup dari berbagai bidang yang mendapat bantuan. Contoh bantuan yang telah di berikan di Desa Sambi Gede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Dari data di atas menunjukkan bahwa program bantuan Bina Lingkungan berdampak bagi peningkatan sarana prasarana. Hal ini dilihat dari bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemohon bantuan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam hal kegiatan keagaan dengan bantuan pembangunan fasilitas sarana prasarana yang diberikan oleh Perum Jasa Tirta I Malang dari apa yang dimiliki pemohon bantuan sebelumnya agar dapat mempermudah masyarakat dalam beribadah.

C. Pembahasan

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Perekonomian Masyarakat khususnya Di Desa Sambi Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, artinya penelitian ini merupakan pendekatan pengkajian hukum yang melihat pada kenyataan didalam kehidupan sosial

kemasyarakatan terutama dalam hal ini Pelaksanaan PKBL Perum Jasa Tirta I Malang, dimana output dan outcome yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat mandiri sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mencapai *Good Governance*.

- a. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

Dalam sub pembahasan ini peneliti akan menjelaskan beberapa data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 dengan informan 1 yaitu bapak Tri Hardjono, SE sebagai Kepala Bag. Humas & PKBL, informan 2 yaitu Yusuf Wibisono, SE sebagai pengatur PKBL. Peneliti mendapatkan informasi yang cukup dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dalam upaya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Sambi Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Adapaun data yang didapat kurang lebih antara lain mengenai struktur organisasi bagian Humas dan PKBL beserta *job description*, program kerja PKBL Perum Jasa Tirta I yang menjelaskan secara rinci posisi keuangan perusahaan dalam pelaksanaannya dan yang terakhir tata cara pelaksanaan PKBL yang menjelaskan mengenai *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam menyelenggarakan program kemitraan dan bina lingkungan. Dengan tetap berpegang teguh pada Permeneg BUMN Nomor

PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus menjelaskan bahwa PKBL merupakan bidang kerja yang baru dan secara umum sudah ditetapkan secara wajib bagi lembaga-lembaga pemerintah khususnya lembaga yang berkaitan dengan pengelolah sumber daya alam untuk menyelenggarakan PKBL. Lebih jelas lagi bahwa terselenggaranya PKBL ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permeneg PKBL tersebut, maka semua BUMN dengan bentuk Persero dan Perum harus melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permeneg PKBL merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terutama Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa:

- Ayat (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sebagai perusahaan negara yang berperan memberikan masukan kepada kas negara tidak lupa dalam UU ini diatur mengenai timbal balik BUMN kepada masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 88 bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL memberikan kewajiban kepada semua

BUMN di Indonesia untuk menerapkan PKBL, dan salah satunya adalah Perum Jasa Tirta I yang dalam penelitian ini mengambil tempat penelitian di Desa Sambu Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Dalam hal ini juga karena Perum Jasa Tirta I merupakan BUMN dengan bentuk Perusahaan Umum (Perum) dan tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan berkewajiban, bahwa BUMN Pembina yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 Permeneg PKBL seharusnya:

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL.
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL.
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan.
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat.
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan.
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan.
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL.
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Perum Jasa Tirta I menanggapi Permeneg PKBL dengan mengeluarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) PKBL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi KP.124/KPTS/DU/2010

Tentang Pengaturan Kembali Organisasi Perusahaan, Tugas Pokok, Dan Wewenang Direksi Perum Jasa Tirta I. Dalam melakukan pengelolaan dana Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jasa Tirta I dilaksanakan oleh bagian PKBL beserta staf dan dibantu oleh petugas yang ada dilapangan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : KP.081.2/KPTS/DU/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Dan Staf Yang Diperbantukan Dalam Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Di Lingkungan Perum Jasa Tirta I. Dimana Surat Keputusan (KPTS) tersebut yang ditujukan kepada setiap Kantor Divisi Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo untuk dijadikan pedoman PKBL. Seperti yang tertuang dalam hasil penelitian pada poin 1.1 mengenai organisasi pelaksana program kemitraan dan bina lingkungan yang menjadi acuan perusahaan dalam membentuk unit khusus yang menangani Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di Perum Jasa Tirta I. Hasil penelitian dalam data sekunder tersebut menyatakan bahwa Perum Jasa Tirta I membentuk unit yang mengurus PKBL yang bertujuan untuk memberikan tanggung jawab baru kepada divisi-divisi yang terkait agar dapat melihat lebih dekat lagi masyarakat yang berada di lingkungan kerja Perum Jasa Tirta I khususnya pada Divisi Jasa Asa I Karangates yang berada di Desa Sambi Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Jadi peneliti dapat menganalisis bahwa pada poin 1.1 mengenai organisasi pelaksana program kemitraan dan bina lingkungan sudah sesuai dengan Permeneg BUMN No. PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada Pasal 5 huruf a yang berbunyi “Perusahaan BUMN harus membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL dalam pelaksanaannya”.

Hasil penelitian dalam data sekunder pada poin 1.2 dan 1.3 yang menjelaskan mengenai program kerja organisasi dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tata cara pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan Perum Jasa Tirta I yang tertuang dalam keputusan Direksi No.KP.053/KPTS/DU/2010 Tanggal 14 Mei 2010 tentang Pedoman Penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Perum Jasa Tirta I. Menjelaskan bahwa pembentukan unit PKBL dibantu oleh Divisi terkait dan yang terlibat dalam PKBL tersebut sertamerta ikut menentukan wewenangnya dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL yang dimanan dijelaskan dan harus dikaitkan sebagai dasar acuan dengan ketentuan Pasal 5 Permeneg PKBL, maka dapat dideskripsikan bahwa Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN Pembina dan melaksanakan kewajibannya sebagai BUMN Pembina. Hal ini dikarenakan Perum Jasa Tirta I melakukan hal-hal yang ditentukan sebagai kewajiban BUMN Pembina pada Pasal 5 Permeneg PKBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada pasal 5 huruf c menjelaskan bahwa setiap BUMN pembina mempunyai “kewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”. Dalam penyusunannya dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dimana RKA yang dimaksud pada pasal 18 ayat 2 dalam Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dirinci menurut wilayah binaan.
- b. Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaannya dana sesuai dengan rencana kerja.
- c. Proyeksi posisi keuangan, laporan aktiva dan arus kas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- d. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Artinya dalam hal ini, jika peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada poin 1.2 dan 1.3 yang menjelaskan mengenai program kerja organisasi dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tata cara pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan Perum Jasa Tirta I telah sesuai dengan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pasal 5 huruf b dan c yang mengharuskan “menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL.

Dan yang terakhir hasil penelitian dalam data sekunder pada poin 1.4 yang menjelaskan mengenai output dan outcome program kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Jasa Tirta I . Peneliti dapat menjelaskan bahwa dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan PKBL Perum Jasa Tirta I Bapak Tri Hardjono, SE pada hari rabu tanggal 24 (dua puluh empat) bulan oktober tahun 2013 sudah sebagian besar terelaisasi dengan baik sehingga output dan outcome dari pelaksanaan PKBL telah sesuai dengan fakta di lapangan hanya saja terkendala pada monitoring kegiatan usaha masing-masing mitra binaan. Regulasi mengenai CSR yang telah di atur oleh pemerintah sejak tahun 1989 dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 1232/KMK.013/1989 pada 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 diamana menurut Kartasasmita (1996:161 -162) yang menjelaskan mengenai *Action and Facilitation* yang artinya :

Menerapkan program yang telah disepakati bersama, sehingga program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan yang nantinya monitoring, supervisi dan pendampingan dijadikan kunci keberhasilan implementasi program.

Jadi kesimpulannya adalah peneliti menilai ini bahwa Perum Jasa Tirta I belum benar-benar melakukan monitoring, supervisi dan pendampingan sebagaimana mestinya agar perkembangan usaha mitra binaan semakin bisa maju. Artinya selama ini yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN yang memberikan bantuan modal kepada UKM / IKM

hanya sekedar memikirkan bagaimana dana itu disalurkan kepada UKM / IKM yang sesuai dengan kriteria dan pertanggung jawaban UKM / IKM itu sendiri hanya dalam bentuk bagaimana pinjaman modal itu dapat diangsur tepat waktu. Secara teoritis peneliti melihat dari prespektif prinsip-prinsip *governance* yang antara lain dijelaskan oleh Mustopadidjaja dalam Syamsiar (2006:63-66) dan sudah peneliti jabarkan dalam bab dua yaitu : prinsip demokratis dan pemberdayaan, prinsip pelayanan, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip partisipasi, prinsip kemitraan, prinsip desentralisasi, konsistensikebijakan dan kepastian hukum dapat menilai bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal hubungannya dengan masyarakat. Sehingga peneliti mengharapkan dengan mengembangkan program dan inovasi yang ada bisa lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

Dalam sub pembahasan ini peneliti akan menjelaskan beberapa informasi-informasi yang sudah diperoleh dari data skunder. Peneliti

mendapatkan informasi yang cukup dalam menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Adapun informasi yang didapat kurang lebih antara lain secara umum mengenai program kemitraan yang merupakan wadah untuk pengembangan UKM dikarenakan program ini dapat menjawab dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini dialami oleh UKM di Indonesia khususnya dalam hal ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I yang peneliti fokuskan pada daerah Sambu Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, dimana mengingat daerah tersebut jauh dari kota dan merupakan daerah sekitar wilayah kerja Perum Jasa Tirta I. Secara umum cara mengembangkan UKM sangat susah dimana permasalahan utamanya adalah belum dapat mengakses fasilitas perbankan yang komersial dalam bentuk suatu modal usaha dan pengetahuan tentang usaha, untuk itu mekanisme dan struktur kelembagaan kemitraan diatur berdasarkan KEP-2361MBU/2003 yang merupakan peraturan terbaru dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat memenuhi harapan pelaku UKM. Dimana yang dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan di Perum Jasa Tirta I

dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola 2% dari penyisihan laba setelah pajak yang tercantum sesuai dalam PER-05/MBU/2007, serta mempertimbangkan kondisi perusahaan. Sedangkan bentuk pelaksanaan di Kantor Divisi khususnya Divisi Jasa Asa I yang bertanggung jawab terhadap binaan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Hasil penelitian dalam data sekunder pada poin 2.1 yang menjelaskan mengenai faktor Pendukung dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Faktor pendukung pelaksanaan CSR pada Perum Jasa Tirta I Malang yaitu adanya dukungan *stakeholder*, antara lain pengelola perusahaan, LSM, pemerintah serta masyarakat memperlancar berjalannya program ini. Sehingga dalam menyelenggarakan kegiatan pemerataan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, namun seluruh pemangku kepentingan termasuk lembaga yang bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat. Selain itu, adanya komitmen yang tinggi dari karyawan yang ingin merangkul masyarakat sekitar agar program PKBL ini lebih bermanfaat untuk masyarakat terutama di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Serta Program kerja yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Perum Jasa Tirta I Malang selalu mencoba memberikan inovasi-

inovasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Jadi secara teoritis melihat dari prespektif hubungan *Corporate Social Responsibility* dalam pelaksanaan Program Kemitaan dan Bina Lingkungan, Perum Jasa Tirta I dalam praktiknya menurut Kartasasmita (1996:159 -160) yaitu:

“*Enabling* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.”

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Perum Jasa Tirta I dalam menyelenggarakan kegiatan pemerataan pembangunan melalui program kemitraan dan bina lingkungan merupakan suatu komitmen perusahaan terutama dari karyawan yang ingin merangkul masyarakat sekitar agar program PKBL ini lebih bermanfaat untuk masyarakat terutama di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Serta Program kerja yang dibuat oleh perusahaan yang telah disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. Perum Jasa Tirta I Malang juga selalu mencoba memberikan inovasi-inovasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Hasil penelitian dalam data sekunder pada poin 2.2 yang menjelaskan mengenai faktor Peenghambat dalam pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Faktor penghambat pelaksanaan CSR pada Perum Jasa Tirta I Malang yaitu program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat. Hal ini menyebabkan program CSR belum bergulir sebagai mana mestinya, mengingat masyarakat umum belum mengetahui maupun mengerti apa itu program CSR, apa saja yang dapat dilakukannya dan bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi dengan prosedur perusahaan dan LSM yang bekerja sama dengan perusahaan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari perusahaan kepada masyarakat sekitar pada khususnya.

Sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungannya, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menjalankan kehidupan berbisnis dan masih dihindangi dengan pemikiran-pemikiran masa lampau, bahwa suatu bentuk bantuan diberikan itu hanya berbentuk santunan konsumtif yang tidak ada kelanjutannya. Di sinilah dibutuhkanannya peranan perusahaan sebagai pembina di mana perusahaan sebagai aktor sekaligus fasilitator serta motivator membangun sinergi dengan masyarakat.

Jadi secara teoritis melihat dari prespektif hubungan *Corporate Social Responsibility* dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perum Jasa Tirta I dalam praktiknya menurut Kartasasmita (1996:159 -160) yaitu:

"Empowering adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan

langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.”

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Perum Jasa Tirta I dalam menyelenggarakan kegiatan pemerataan pembangunan melalui program kemitraan dan bina lingkungan, harus betul-betul memonitoring mitra binaannya dan kinerja lembaga LSM yang bekerja sama dengan perusahaan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan karena masyarakat masih banyak yang berpandangan, bahwa kehidupan berwirausaha itu kurang begitu menguntungkan bagi mereka, mereka lebih baik hidup sebagai petani, buruh atau pekerja yang berpenghasilan sedikit dari pada harus berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai wirausahawan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang relatif rendah dari pembayaran angsuran, termasuk kompetensi mitra binaan dalam ruang pemasaran untuk meraih peluang.

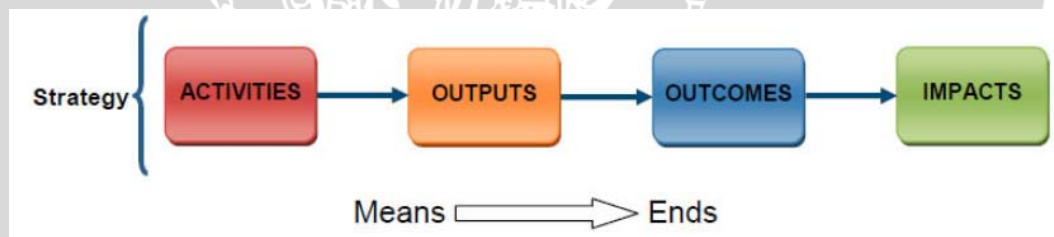
- c. Dampak yang muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.

Dalam sub pembahasan ini peneliti akan menjelaskan beberapa data-data yang sudah diperoleh dari data skunder dan hasil wawancara. Peneliti mendapatkan informasi yang cukup dalam menjelaskan dampak

yang muncul dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta 1 dalam upaya pemerataan pembangunan di Desa Sambi Gedhe, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Adapun data yang didapat kurang lebih antara lain peningkatan pendapatan oleh masyarakat sekitar dan tersedianya prasarana yang dapat menunjang kegiatan masyarakat desa sambi gedhe, kecamatan sumber pucung kabupaten malang.

Hasil penelitian dalam data sekunder pada poin 3.1 menjelaskan mengenai dampak dari program kemitraan Program Kemitraan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil yang dilihat dari peningkatan pendapatan pertahun setelah menjadi mitra binaan Perum Jasa Tirta I Malang. Dari data tahun 2012-2013 pendapatan perbulan mitra binaan seharusnya dapat menjadi kunci secara kumulatif dalam pendapatan pertahun nantinya, sehingga pinjaman yang diberikan oleh Perum Jasa Tirta melalui Program Kemitraan serta binaan-binaan yang dilakukan oleh LSM yang terkait dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil baik dalam sektor financial maupun materil. Sedangkan dalam data sekunder pada poin 3.2 menjelaskan mengenai dampak Program Bina lingkungan dapat dilihat dari bantuan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan terutama dalam hal kegiatan keagaan dengan bantuan pembangunan fasilitas sarana prasarana yang diberikan oleh Perum Jasa Tirta I Malang dari apa yang dimiliki pemohon bantuan sebelumnya agar dapat mempermudah masyarakat dalam beribadah.

Jadi secara teoritis peneliti melihat dari prespektif pendekatan *Good Corporate Governance* dengan teori perubahan tentang bagaimana suatu intervensi dapat direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Seperti teori apapun, tidak ada jaminan bahwa teori ini akan berhasil karena didasarkan pada asumsi sekitar hubungan sebab-akibat dimana para pendukung intervensi ini berharap hasilnya akan terus benar. Pendekatan Teori Perubahan bisa menjadi paling meyakinkan apabila dimungkinkan untuk melacak rantai kausal antara output jangka pendek, outcome jangka pendek sampai jangka menengah, dan impact atau dampak jangka panjang, seperti yang ditunjukkan dengan sangat sederhana pada gambar di bawah ini:



Gambar 16. Pendekatan Teori Perubahan

Strategy merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan khususnya Perum Jasa Tirta I dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Contohnya yang merupakan strategi perusahaan yang biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan Perum Jasa Tirta I, serta bagaimana Perum Jasa Tirta I memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Kedua,

activities merupakan kegiatan atau aktivitas dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa tirta I dalam hal ini merupakan langkah selanjutnya untuk mewujudkan strategi, dengan terbitnya SOP perusahaan sebagai langkah awal secara administratif agar perusahaan mampu menyelektif calon mitra binaan dan penerima dana bina lingkungan. Ketiga, *output* dan *outcome* atau dapat di artikan *output* adalah hasil atau efek yang langsung dan segera dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I, contohnya dalam hal ini terbangunnya pemberdayaan masyarakat dan berbagai kelompok usaha khususnya yang ada di Desa Sambu Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Sedangkan *outcome* adalah hasil atau efek jangka panjang dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, contohnya dalam hal ini meningkatnya pendapatan masyarakat di Desa Sambu Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Keempat, *impact* adalah dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau menurut Otto Soemarwoto (1989:43) mendefinisikan dampak “suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas.” Dampak itu sendiri antara lain dampak negatif dan dampak positif. Contohnya dalam hal ini memberikan pandangan untuk mengungkap analisis dampak yang nantinya akan terjadi dalam pembangunan kedepannya, terutama sektor ekonomi yang memberikan dapak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat di Desa Sambu Gedhe Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang.